

## BAB II

### PEMBIAYAAN *QARDH* DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pemberian pembiayaan dewasa ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank yang berlandaskan prinsip konvensional, sedangkan dalam syariah disebut dengan pembiayaan. Dalam kamus pintar ekonomi syariah pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiyah bitamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau unit usaha syariah (uus) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>1</sup> Pembiayaan sering digunakan untuk menunjang aktifitas utama kegiatan lembaga keuangan

---

<sup>1</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 1-2.

syariah maupun konvensional, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

## 2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro.<sup>2</sup>Adapun tujuan pembiayaan secara makro adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dan dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu meningkatkan daya produksi.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 4

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, yaitu setiap usaha yang di buka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upanya meminimalkan resiko, yaitu usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal maka, pengusaha harus meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat di kembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, yaitu dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan dalam kaitan dalam masalah dana, maka pembiayaan menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut diatas, pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank syariah secara umum memiliki fungsi untuk:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan semangat berusaha
- e. Stabilitas ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 5-11.

### 3. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. **Pembiayaan produktif**, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas, seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan:(a) peningkatan produksi, baik baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi,yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan perluasan usaha, maupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi menurut Antonio adalah:
  - a) Untuk pengadaan barang-barang modal;
  - b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;

- c) Berjangka waktu menengah dan panjang.
- b. **Pembiayaan konsumtif**, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Antonio Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini.
- 1) *Al-bai`bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murabahah*) atau jual beli dengan angsuran.
  - 2) *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli.
  - 3) *Al-musyarakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
  - 4) *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Karim, secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak di pergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud

---

<sup>4</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm.160-168.

pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang di berikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam bentuk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat di bagi menjadi lima (5) bagian, yaitu:

- 1) Pembiayaan konsumen Akad *Murabahah*
- 2) Pembiayaan konsumen Akad IMBT
- 3) Pembiayaan konsumen Akad *Ijarah*
- 4) Pembiayaan konsumen Akad *Istisna*
- 5) Pembiayaan konsumen Akad *Qard + Ijarah*

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
- 2) Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock*, atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Namun, jika berbentuk *goods in process*, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang di berikan adalah pembiayaan *salam*. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah *istishna*.

- 3) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*.<sup>5</sup>

## **B. *Qardf***

### 1. Pengertian *Qardf*

Menurut bahasa, *Qardf* adalah memotong. Disebutkan dalam kamus *Al-Mishbah* “*Qaradhtu al-syai’a qardhan*” yang berarti saya memotongnya. Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang anda berikan kepada orang lain untuk dikembalikan. Dinamai *qardf* karena si pemilik memotong hartanya. Menurut istilah para ahli fikih, *al- qardf* adalah memberikan sesuatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan.<sup>6</sup>

*Qardf* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad *qardh* ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.<sup>7</sup>

### 2. Rukun *Qardf*

Rukun dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:

---

<sup>5</sup>Adiwarman A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 244.

<sup>6</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta Selatan; Hikmah, 2010), hlm. 51-52

<sup>7</sup> Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008), hlm. 100

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
- b. Objek akad, yaitu qardh (dana)
- c. Tujuan, yaitu 'iwad atau countervalue berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp.X,- dikembalikan Rp.X,-); dan
- d. *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

### 3. Syarat *Qardh*

Syarat dari akad Qardh atau Qardhul Hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- a. Kerelaan kedua belah pihak; dan
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.<sup>8</sup>

### 4. Landasan Syariah *Qardh*

- a. Al-Quran

QS. Al-Baqarah/2: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan

QS. Al-Hadid/57: 11

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafii Antonio, *op. cit.*, hlm. 48

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

b. Hadis\

Hadist dari Ibnu Majah ra. Bahwa Nabi saw. Bersabda:

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة

*“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali,”*. Hadist dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Saw. ia bersabda *“Siapa yang meminjam harta orang lain dan berniat mengembalikannya, maka Allah akan mengembalikannya; dan siapa yang meminjam harta orang, tetapi berniat merugikannya (tidak ingin mengembalikannya), maka Allah akan membuatnya rugi.”*

### C. Perekonomian Masyarakat

#### 1. Ekonomi

Arti dalam Pengertian Ekonomi, menurut bahasa datang dari bahasa Yunani yakni Oikos bermakna keluarga atau rumah tangga sedang Nomos bermakna aturan atau peraturan. Sedang menurut istilah yakni manajemen rumah tangga atau aturan rumah tangga. Pengertian Ekonomi yaitu satu diantara bagian pengetahuan sosial yang mengulas serta pelajari mengenai aktivitas manusia

terkait segera dengan distribusi, mengkonsumsi serta produksi pada barang serta layanan.

Ilmu ekonomi merupakan suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang. Sebagai satu bidang ilmu pengetahuan, perkembangannya bermula sejak tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith seorang pemikir dan ahli ekonomi Inggris menerbitkan bukunya yang berjudul "*An Inquiry Into the Nature and Causes of the wealth of Nations*". Beberapa pandangan dalam buku beliau masih tetap mendapat perhatian dalam pemikiran ahli-ahli ekonomi pada masa ini. Adam Smith dapat dianggap sebagai "*bapak ilmu ekonomi*".<sup>9</sup>

Pada intinya, permasalahan ekonomi yang senantiasa dihadapi oleh manusia sebagai makhluk sosial serta makhluk ekonomi yaitu jumlah keperluan manusia tak terbatas sedang jumlah alat pemuas keperluan manusia terbatas. Ada banyak aspek yang memengaruhi jumlah keperluan seorang tidak sama dengan jumlah keperluan orang lain, yakni diantaranya :

- a. Aspek fisik
- b. Aspek moral
- c. Aspek pendidikan
- d. Aspek ekonomi
- e. Aspek sosial budaya

Jika mengulas tentang Pengertian Ekonomi, secara otomatis akan mengulas mengenai ilmu ekonomi di mana ilmu ekonomi adalah satu pengetahuan kajian yang mengulas serta pelajari mengenai ekonomi tersebut.

---

<sup>9</sup>Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3.

Pada umumnya, pengetahuan ekonomi dibagi jadi dua yakni pengetahuan ekonomi makro serta pengetahuan ekonomi mikro:<sup>10</sup>

- a. Ilmu ekonomi mikro (sering juga disebut dengan istilah teori harga maupun teori alokasi sumber daya) merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang pembahasannya menitikberatkan pada perilaku ekonomi individu rumahtangga, perusahaan dan pasar.
- b. Ilmu ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menitikberatkan pembahasan mengenai perekonomian secara keseluruhan.

## 2. Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni

- a. Kegiatan ekonomi meliputi usaha individu ataupun perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan.
- b. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan menggunakan barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian.

Dengan demikian kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut.<sup>11</sup>

## 3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat

---

<sup>10</sup>Endang Setyo Wati Dkk, *Ekonomi Mikro: Pengantar* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2000), hlm. 5-6.

<sup>11</sup>Sadono Sukirno, *op. cit.*, hlm. 5.

pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.<sup>12</sup> Ada berbagai pendapat yang dikemukakan tentang pengertian kemiskinan:

Mudrajad mendefinisikan kemiskinan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu. Menurut Suparlan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan normal, dan rasa harga diri dari mereka tergolong sebagai orang miskin.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang apa adanya.

M.P todaro mengemukakan dua anggapan dasar yang kiranyanya cukup relevan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kemiskinan, yaitu:

---

<sup>12</sup>Adhi, [adhiprawiraa.blogspot.com/2014/05/pengertian-kemiskinan.html](http://adhiprawiraa.blogspot.com/2014/05/pengertian-kemiskinan.html), diakses tgl 26-07-2016

- a. Kemiskinan identik dengan penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok dibidang pertanian dan kegiatan lain yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional.
- b. Kaum wanita dan anak-anak merupakan kaum yang paling menderita, yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas mereka dalam mencetak pendapatan sendiri, terbatasnya kesempatan menikmati pendidikan dan pekerjaan yang layak di sektor formal.

Dari anggapan dasar tersebut dapat diambil konsep-konsep dasar yang perlu dibangun yaitu:

- a. Pembangunan hendaknya lebih diarahkan pada daerah-daerah pedesaan yang identik dengan penduduk miskin dengan meningkatkan potensi yang dimiliki daerah pedesaan yang bersangkutan.
- b. Kaum wanita dan anak-anak harus diberi kesempatan berusaha secara mandiri agar dapat berperan serta secara aktif dalam proses pembangunan.

Indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak, terbatasnya kepemilikan tanah dan alat produksi, kurangnya kemampuan membaca dan menulis, kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup, kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi, akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas, dalam studi tentang masalah kemiskinan, ada dua perbedaan penting yang harus dikemukakan. Pertama, kemiskinan kultural dan kedua, kemiskinan struktural. Kedua model tersebut tidak bisa diberi perspektif pandang yang sama. Demikian pula dalam cara menghadapinya. Cara yang dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan

yang diakibatkan oleh struktur yang timpang tentu saja berbeda dengan kemiskinan akibat karakter budaya dan etos kerja yang rendah. Masing-masing model kemiskinan memiliki pendekatan yang berbeda satu sama lain.<sup>13</sup>

Kriteria kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik ada 14 kriteria, antara lain:

- a. Luas bangunan tempat tinggal kurang 8 m<sup>2</sup> per orang
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
- h. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik

---

<sup>13</sup>Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 289.

- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat SD/hanya SD
- n. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti sepeda motor (kredit atau nonkredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Ciri-ciri kemiskinan penduduk antara lain adalah:

- a. Sebagian besar kelompok penduduk yang miskin tinggal di daerah pedesaan. Mereka pada umumnya bekerja sebagai buruh tani karena tidak memiliki tanah, namun tidak luas sehingga tidak cukup untuk membiayai hidup sekeluarga dengan layak.
- b. Banyak di antara mereka yang menganggur atau setengah menganggur. Pengertian setengah menganggur yaitu jika waktu kerjanya rata-rata setiap hari kurang dari 3 jam.
- c. Jika mereka mempunyai usaha sendiri, biasanya alat yang digunakan itu sewaan dari orang lain. Sifat usaha mereka kecil-kecilan dan terbatas karena kekurangan modal.
- d. Kebanyakan mereka tidak berpendidikan dan jika berpendidikan, tingkat pendidikannya rendah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 6.

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara dapat dibedakan ke dalam negara maju (*develop country*) dan negara berkembang (*developing country*). Umumnya pada negara yang maju jumlah penduduknya mengalami pertambahan yang relatif kecil, sedangkan pertambahan penduduk di negara-negara berkembang relatif besar atau cepat. Dengan demikian sudah tentu, jika pada negara berkembang sebagian besar masih berada dalam keadaan miskin. Penduduk yang miskin sebagian besar berada di desa-desa, sehingga dapat dikatakan bahwa pusat kemiskinan berada di desa. Konsep pembangunan pada pusat kemiskinan, berarti bahwa pembangunan harus dimulai dari desa. Pembangunan dimulai dari bawah dengan *bottom up strategy*. Pembangunan dari bawah dalam konsep ini mengandung pengertian pembangunan lebih ditekankan atas dasar kemampuan sendiri, tidak terlalu menggantungkan pada pihak lain. Kalau pusat kemiskinan (desa) telah dibasmi kemiskinannya, maka akan terjadi keseimbangan dengan keadaan di kota. Dengan demikian, maka akan dapat diadakan pembangunan yang sifatnya serempak bersama-sama untuk waktu selanjutnya.<sup>15</sup>

Pembangunan dari bawah mempunyai tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat di daerah itu. Pendapatan masyarakat harus dapat ditingkatkan sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dapat terlaksana. Pendapatan masyarakat yang perlu ditingkatkan di sini adalah masyarakat yang termasuk miskin. Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidup

---

<sup>15</sup>Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 15.

yang paling pokok adalah yang berada di bawah garis kemiskinan mutlak.<sup>16</sup> Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam satu paket barang dan jasa yang diperlukan setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi.

Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:

- a. Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Di Indonesia salah satunya berbentuk BLT.
- b. Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
- c. Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Persiapan bagi yang lemah juga dapat berupa pemberian pelatihan sehingga nanti yang bersangkutan dapat membuka usaha secara mandiri.<sup>17</sup>

Di Indonesia, pemerintah berpendapat bahwa, jika rakyat turut menyumbang dalam suatu rencana, mereka akan bertanggung jawab terhadap

---

<sup>16</sup>Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1980), hlm. 41.

<sup>17</sup>Kammila Shaffirah, <https://en-gb.facebook.com/notes/muhammad-saw-sebagai-pedagang/ide-ide-pengentasan-kemiskinan-dalam-peradaban-islam/171295129553652>, diakses tgl 25-07-2016.

rencana itu dan akan membanggakannya.<sup>18</sup> Para perencana dan pelaksana program pembangunan telah lama menyadari pentingnya akses rumah tangga miskin terhadap kredit, terutama di wilayah pedesaan. Kredit dapat membuat rumah tangga untuk memulai atau memperluas aktivitas usaha dan pada waktu yang bersamaan meningkatkan produksi dan menciptakan surplus-surplus keuangan. Ini akan memajukan standar kehidupan yang lebih baik dan pembangunan secara berkesinambungan. Pengembangan penduduk dan undang-undang pembangunan keluarga sejahtera menjadi aspek hukum bagi semua kebijaksanaan dan program pengembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera.<sup>19</sup>

#### 4. Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja tetapi tidak bekerja baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah

---

<sup>18</sup>Dorodjatun Kuntjoro dan Jakti, *Kemiskinan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 201.

<sup>19</sup>Sutyastie Soemitro Remi dan Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 24.

lainnya. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan relatif rendah dan kurang merata.

Budaya pilih-pilih pekerjaan juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran. Pada dasarnya setiap orang ingin bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan juga ditambah dengan sifat gengsi, maka tidak heran jika kebanyakan yang ditemukan di Indonesia bukan pengangguran terselubung, melainkan pengangguran terbuka yang didominasi oleh kaum intelektual (berpendidikan tinggi). Selain budaya memilih-milih pekerjaan, budaya negatif lain yang menjamur di Indonesia adalah budaya malas. Malas mencari pekerjaan sehingga jalan keluar lain yang ditempuh adalah dengan menyogok untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak mau mengambil resiko juga menjadi sebuah penyebab pengangguran di Indonesia, terbilang sedikit orang yang mau mengambil resiko demi sebuah pekerjaan. Terlalu berfikir kepada keuntungan atau gaji yang akan diraih, tanpa menoleh kepada pengalaman yang mungkin bisa didapatkan.

Pembahasan tentang pengangguran tidak bisa lepas dari masalah ketenagakerjaan, yang meliputi kesempatan kerja, lapangan kerja dan pendidikan. Jika faktor-faktor tersebut berhubungan secara negatif maka terciptalah pengangguran. Tingkat pendidikan yang rendah akan menghasilkan peluang kerja

yang rendah pula. Kesempatan kerja yang rendah bisa jadi diakibatkan oleh ketersediaan lapangan kerja yang jumlahnya sedikit. Sedangkan lapangan kerja yang sedikit tersebut biasanya hanya diperuntukkan bagi individu dengan keahlian (*skill*) yang memadai. Keahlian yang tinggi akan ditemukan pada kualitas individu yang berpendidikan tinggi, yang *notabene* berjumlah sedikit dari totalitas masyarakat yang ada. Konsekuensi logisnya adalah jumlah masyarakat berpendidikan rendah dan yang mayoritas tersebut harus rela dipinggirkan. Sehingga, jika terpaksa bekerja maka jenis pekerjaan yang didapatkan pasti termasuk kategori yang berkualitas rendah, yang itu tentu saja memberi kontribusi upah yang rendah pula. Hal demikian merupakan konstitusi ekonomi yang sengaja diciptakan. Kontribusi upah yang rendah secara ekonomis akan menjadikan tingkat pendidikan yang rendah dan berputar lagi pada lingkaran yang sama. Putaran-putaran yang demikian itu pada akhirnya adalah penciptaan angka pengangguran antardesa dan kota.<sup>20</sup>

##### 5. Kesejahteraan Masyarakat

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai serta dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun

---

<sup>20</sup>Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 301.

perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi bagi para pelaku ekonomi atau masyarakat. Dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai, dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri.<sup>22</sup>

Kesejahteraan masyarakat menurut Biro Pusat Statistik Indonesia dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Tingkat pendapatan keluarga
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga
- c. Tingkat pendidikan keluarga
- d. Tingkat kesehatan keluarga

---

<sup>21</sup>Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 25.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 85.

e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga<sup>23</sup>

Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang adil dan merata merupakan tujuan dari pembangunan nasional Indonesia. Berbagai program dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan guna mencapai tujuan tersebut. Namun dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator yang terukur dari berbagai aspek pembangunan.<sup>24</sup>

## 6. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Menurut Suryana, terdapat empat teori atau model pembangunan ekonomi yang bisa diterapkan khususnya dalam pembangunan di Indonesia, yaitu:

- a. Model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan, tujuan pokok strategi ini adalah meningkatkan laju produksi.
- b. Model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.
- c. Model pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan.

---

<sup>23</sup>Adi Nugroho, [http://www.eprints.undip.ac.id/38829/3/BAB\\_II.pdf](http://www.eprints.undip.ac.id/38829/3/BAB_II.pdf), diakses tgl 26-07-2016.

<sup>24</sup>Seksi Statistik Sosial, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banjar*, (Banjar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, 2012), hlm. 2.

- d. Model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*the basic necessary oriented*).

Pembangunan adalah industrialisasi yang diharapkan dapat menyediakan lapangan dan kesempatan kerja. Pembangunan adalah sarana yang dicita-citakan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.<sup>25</sup> Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, maka diperlukan komponen-komponen pembangunan. Gant menyebutkan bahwa komponen-komponen pembangunan terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi.

*The components of development-natural resources, capital, technology, and manpower-must be brought into focus for the purpose. The government must provide an environment of safety and stability which at least permits and even encourages development.*<sup>26</sup>

Walaupun kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai sebahagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan di atas maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya

---

<sup>25</sup>Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 303.

<sup>26</sup>Dikutip dari George F. Gant, *Development Administration, Concept, Goals, Methods*, (London: University of Wisconsin Press, 1979), hlm. 5.

didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.<sup>27</sup>

Pembangunan di daerah dengan melalui kegiatan-kegiatan proyek pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadakan perbaikan keadaan sosial-ekonominya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus cukup cakap dalam mengelola proyek sesuai dengan peranannya. Jika strategi pembangunan itu meliputi daerah yang cukup luas dan menelan biaya yang sangat besar, maka dukungan kelancaran dan keberhasilan proyek harus juga datang dari pemerintah pusat.

---

<sup>27</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985), hlm. 13.